



INTISARI

BPS Kabupaten Sleman merupakan instansi vertikal yang memiliki arti instansi tersebut bertanggung jawab langsung kepada BPS Pusat melalui BPS Provinsi DIY. Pelaksanaan pengeluaran kas yang terjadi di BPS Kabupaten Sleman terdiri dari dua mekanisme pembayaran yaitu pembayaran Langsung (LS) dan pembayaran menggunakan Uang Persediaan (UP).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengeluaran yang terjadi pada BPS Kabupaten Sleman serta kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang menjadi pedoman sistem pengeluaran kas BPS Kabupaten Sleman adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data didapat dengan cara wawancara dengan salah satu staf subbagian Tata Usaha BPS Kabupaten Sleman dan observasi yang dilakukan penulis selama pelaksanaan magang berlangsung.

Dari hasil pembahasan yang telah penulis lakukan, terdapat permasalahan pada penerbitan SPBy yang dilakukan di akhir setelah dana dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran. Dana yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran bukan berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 yang menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas UP berdasarkan SPBy yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK. Permasalahan tersebut dikarenakan minimnya staf yang terdapat pada subbagian Tata Usaha, serta kakunya peraturan yang ada akan memakan waktu yang cukup lama jika penerbitan SPBy dilakukan di awal.

Kata kunci: sistem pengeluaran kas, pembayaran langsung, uang persediaan



ABSTRACT

Central Bureau of Statistics Sleman is a vertical institutions which has a direct responsibility to Central Bureau of Statistics Indonesia though Central Bureau of Statistics Yogyakarta Province. The implementation of cash disbursement in Central Bureau of Statistics Sleman consists of two payment mechanisms. The first mechanism is difrect payment and the second one is payment using stock of money or money supply.

This research aims to undestabd cash disbursement system in Central Bureau of Statistics Sleman and its compability with the applicable regulation which is based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012. This research uses qualitative data obtained from interview with the one of subdivision staff of administrative affairs at Central Bureau of Statistics Sleman and selft observation by author durung internship period.

Based on the doscussion, there is problem on the last step SPBy publication process after the expenditure of founds by treasurer which inappropriate with the SPBy publication by PPK.

This condition inapropriate with Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/MK.05/2012 because the payment using stock of money should be based on approved SPBy from PPK. This problem due lack of staff at the subdivision of administrative affairs and rigidity of regulation which causes SPBy publication process needs much longer time if SPBy publication should be done at the first step of the process.

Key words: cash disbursement system, direct payment, money supply